

Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian

Membangun Budaya Damai di Aceh

Yusny Saby, Dkk



BADAN KESBANGPOL ACEH

2020

Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian

MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DI ACEH

Yusny Saby, dkk

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

2020

**Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Membangun
Budaya Damai di Aceh:** Yusny Saby (dkk) / Banda Aceh:
Badan Kesbangpol Aceh, 2020.

Tim Penulis:

Yusny Saby
Sehat Ihsan Shadiqin
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Bustami Abubakar
Hafas Furqani
Sulaiman Tripa
Affan Ramli
Nurullah

Editor:

Ahmad Fauzan

Cetakan Pertama, Desember 2020

Diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Aceh (Badan Kesbangpol Aceh)

Badan Kesbangpol Aceh

Jl. Tgk. Malem No.8,
Kuta Alam, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Kode Pos 24415
Provinsi Aceh

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Aceh - 3

Daftar Isi - 7

Pengantar Tim Penulis – 9

**BAB I : Melacak Implementasi Pendidikan Damai
Di Aceh**

Bustami Abubakar - 11

**BAB II : Demokrasi Merusak Damai, Adatokrasi
Merawatnya**

Affan Ramli - 57

BAB III : Menjadikan Aceh Kiblat Ekonomi Syari'ah

Hafas Furqani -83

**BAB IV : Arti Penting Keluarga Dalam Mendidik
Generasi Cinta Damai**

Nurullah -115

**BAB V : Sumberdaya Alam, Politik, dan
Pembangunan**

Sulaiman Tripa -141

MELACAK IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAMAI DI ACEH

Bustami Abubakar

Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh

Pendahuluan

Tahun 2005 memiliki makna istimewa dalam sejarah peradaban Aceh. Dalam tahun itu babak baru peradaban Aceh ditancapkan. Masyarakat di seluruh dunia tahu bahwa hanya beberapa hari menjelang tahun 2005, ratusan ribu penduduk Aceh menjadi syuhada dalam musibah tsunami yang melanda negeri ini. Menurut catatan Bank Dunia, 286.000 orang di 14 negara meninggal dunia. Dari jumlah itu, 221.000 ribu meninggal atau hilang di Aceh.¹ Tsunami yang menghantam daratan Aceh pada Minggu pagi, 26 Desember 2004 itu juga telah menyapu bersih sebagian besar bangunan-bangunan megah, sebagai salah satu simbol peradaban bangsa. Wilayah-wilayah yang disinggahi tsunami

¹ Lihat, <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2012/12/26/indonesia-reconstruction-chapter-ends-eight-years-after-the-tsunami>

kemudian menjadi padang tandus yang ditumpuki gunung sampah.

Tsunami telah memporak-porandakan peradaban Aceh, tetapi ia tidak menjadi faktor utama peletakan dasar peradaban baru di Aceh. Bagi masyarakat Aceh yang hidup dalam naungan ajaran agama yang kuat, betapa pun dahsyatnya musibah itu, tetap saja dimaknai sebagai takdir Allah yang mesti diterima. Orang Aceh percaya, selalu ada hikmah yang tersembunyi dibalik sebuah musibah. Ternyata, hikmah terbesar dari musibah tsunami adalah terhentinya konflik bersenjata antara pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pihak TNI/Polri sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia. Karena itu, sulit dibantah jika ada orang yang mengatakan bahwa musibah tsunami adalah cara Tuhan menghentikan perang di Aceh.²

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa semenjak Kerajaan Belanda mengultimatum perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873, Aceh telah menjadi arena perang yang nyaris tak berkesudahan. Pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Prof. Nazaruddin Sjamsuddin menamakan babakan sejarah perang di Aceh dengan istilah penghancuran peradaban. Dia membagi babakan itu ke dalam 9 (sembilan) tahap, sejak masa perlawanan melawan Portugis (1509) sampai setelah berakhirnya pemberlakuan

² Lihat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218164558-20-19156/bencana-tsunami-akhiri-konflik-di-aceh>

DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh.³ Status Aceh sebagai DOM dicabut secara resmi pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Jendral Wiranto selaku Panglima ABRI pada masa itu. Realitanya, pencabutan status DOM di Aceh tidak serta-merta menjadikan daerah ini menjadi kawasan yang damai, bebas dari konflik bersenjata. Gerakan perlawanan dari pihak GAM tetap berlanjut yang direspon dengan pendekatan keamanan oleh pihak tentara dan polisi Indonesia melalui ragam nama pasukan dan sandi operasi militer/kepolisian.⁴ Perang GAM *versus* TNI/Polri terus berkecamuk di berbagai wilayah di Aceh dengan intensitas yang fluktuatif, hingga akhirnya bencana tsunami datang merenggut jiwa ratusan ribu penduduk sekaligus menyudahi pertikaian antara pihak berseteru.

Bagaimanapun, tsunami tidak bertindak secara langsung menghentikan perang di Aceh. Daya rusak yang ditimbulkannya telah mendorong berbagai bangsa dari seluruh penjuru dunia untuk mengulurkan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Aceh. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan jika GAM dan TNI/Polri masih belum berdamai. Atas prakarsa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, pihak GAM dan Pemerintah Indonesia bersedia

³ Nazaruddin Sjamsuddin, "Kata Pengantar" dalam A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. xix-xx.

⁴ Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, (Jakarta, Pustaka Cidesindo, 2000), hal. 94.

menandatangani perjanjian perdamaian di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian damai (*Memorandum of Understanding/MoU*) tersebut dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Di antara butir nota kesepahaman yang disepakati adalah “Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.”⁵

Tsunami memang telah memporak-porandakan infrastruktur di Aceh, sedangkan konflik bersenjata telah menggerus kebudayaan dan peradaban masyarakat. Akan tetapi, perjanjian damai di Helsinki dapat menjadi titik pijak baru (*new spot*) bagi rekonstruksi infrastruktur dan kebudayaan Aceh. Aceh pasca tsunami dan MoU Helsinki adalah Aceh Baru yang penuh harapan,⁶ yaitu Aceh yang merekonstruksi infrastruktur dan kebudayaannya di atas pondasi perdamaian. Salah satu kanal terpenting dan strategis dalam penanaman nilai-nilai perdamaian adalah pendidikan. Oleh karena itu, implementasi pendidikan damai pada daerah-daerah yang pernah mengalami konflik

⁵ Lihat, <https://www.liputan6.com/global/read/2294284/15-8-2005-ri-dan-gam-berdamai-di-helsinki>

⁶ Mengenai konsep Aceh Baru ini, baca Bustami Abubakar, “Catatan Editor” dalam Bustami Abubakar (Ed.), *Ulama dan Politik Menyongsong Aceh Baru*, (Banda Aceh: LSAMA, 2011), hal. xiv-xv.

adalah sesuatu yang sangat perlu,⁷ bahkan *sine qua non*. Pakar Resolusi Konflik Asia Tenggara, Kamarulzaman Askandar dalam Suadi Zainal menyatakan bahwa pendidikan damai harus dikembangkan pada semua tingkatan pendidikan.⁸

Artikel ini mengkaji tentang implementasi pendidikan damai pada lembaga pendidikan di Aceh. Permasalahan yang hendak dikaji adalah mengenai upaya-upaya implementasi pendidikan damai, faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta efek implementasinya terhadap lingkungan sosial masyarakat Aceh.

Pendidikan Damai dalam Wacana

Para pakar dan praktisi pendidikan damai telah memberikan banyak sekali definisi dalam mengkaji konsep pendidikan damai. Setiap orang, kelompok atau lembaga berhak menentukan pilihan atau kecenderungan menggunakan satu atau beberapa konsep tersebut untuk mengamati fenomena yang sedang berlangsung di sekitarnya. Konsultan Unicef di New York, Susan Fountain, dalam salah satu kertas kerjanya memberikan pengertian pendidikan damai sebagai berikut.

⁷ Nugroho Eko Atmanto, "Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Pasca Konflik", *Jurnal Smart*, Vol. 03, Nomor 02, Desember 2017, hal. 156.

⁸ Suadi Zainal, "Post-Conflict Peace Education to Build Sustainable Positive Peace in Aceh" dalam *Proceeding of The 6th AIC Unsyiah*, Banda Aceh, October 4-6, 2016, hal. 400.

“Peace education in UNICEF refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitudes and values needed to bring about behaviour changes that will enable children, youth and adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully; and to create the conditions conducive to peace, whether at an intrapersonal, interpersonal, intergroup, national or international level.”⁹

Fountain memberikan penekanan terhadap pendidikan damai hendaknya mencakupi 3 (tiga) hal, yaitu: mencegah konflik dan kekerasan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian pada level intra individu, antar individu, antar kelompok, nasional atau bahkan internasional.

Pendidikan damai adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu dan anti kekerasan (*non-violence*). Oleh karena itu, aspek-aspek yang dikembangkan pada program pendidikan damai adalah kedamaian dan anti kekerasan, Hak Asasi Manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan

⁹ Susan Fountain, “Peace Education in UNICEF”, *UNICEF Staff Working Papers*, (New York, UNICEF, 1999), hal. 1.

bahasa (*cultural and linguistic diversity*).¹⁰ Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Ian Harris, sebagaimana dikutip Danesh, mengidentifikasi 10 tujuan dari pendidikan damai, yaitu: mengapresiasi kekayaan konsep perdamaian, mengatasi ketakutan, memberikan informasi tentang sistem keamanan, memahami perilaku atau tindakan kekerasan, mengembangkan pemahaman antar budaya, menyediakan orientasi masa depan, mengajarkan perdamaian sebagai suatu proses, mempromosikan konsep perdamaian disertai dengan keadilan sosial, merangsang respek terhadap kehidupan, dan mengakhiri kekerasan.¹¹

Program pendidikan damai yang diselenggarakan Unicef di berbagai belahan dunia telah membuat sebuah daftar yang merangkum tujuan pendidikan damai menurut peserta

¹⁰ Imam Machali, "*Peace Education dan Deradikalisasi Agama*", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II., No. 1, Juni 2013, hal. 44.

¹¹ H. B. Danesh, "Towards an Integrative Theory of Peace Education", *Journal of Peace Education*, Vol. 3., No. 1, March 2006, p. 56.

program. Tujuan tersebut meliputi tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Sebagai contoh, dari aspek pengetahuan, peserta mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab konflik dan memahami makna resolusi nir-kekerasan. Dari aspek ketrampilan, memiliki kemampuan untuk bekerjasama, sedangkan dari aspek sikap adalah dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan.¹²

Para ilmuwan sosial dan pakar yang mengkaji tentang pendidikan damai sepakat bahwa apa saja tujuan atau aspek yang terkandung dalam konsep pendidikan damai akan dapat diformulasikan secara baik dan sistematis melalui lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan damai, yaitu peserta didik, pendidik, dan orangtua siswa. Sebagai pendidik, guru dapat mengajarkan kepada siswa saluran atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kekerasan sehingga ia dapat dicegah, menginformasikan isu-isu kritis tentang pendidikan damai, yaitu menjaga, menciptakan, dan membangun perdamaian. Sebagai mitra guru, orangtua siswa dapat berperan dengan cara mendorong, mendukung dan mengembangkan aktualisasi atau pelaksanaan budaya damai tanpa kekerasan.¹³

Dalam pandangan Nugroho, sekolah sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya adalah miniatur masyarakat yang

¹² Susan Fountain, "Peace Education...hal. 14-16.

¹³ Imam Machali, "*Peace Education*...hal. 46.

di dalamnya terdapat interaksi antar seluruh elemen meliputi, siswa, guru dan tenaga kependidikan dari berbagai latar belakang dan strata sosial yang berbeda.¹⁴ Oleh karena itu, jika lembaga pendidikan tidak diisi dengan pendidikan damai, maka konflik antar elemen tersebut dapat meletup setiap saat. Dengan mengutip data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seorang guru di sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh menulis bahwa dalam tahun 2018, 84% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Hal ini biasanya sebagai akibat dari pertikaian ringan di antara para siswa. Di kalangan guru pun, pertikaian yang berujung pada konflik juga kerap terjadi yang dipicu oleh kesalahpahaman, ketidakpuasan terhadap manajemen sekolah, dan sebagainya.¹⁵

Berbagai pengalaman berinteraksi di sekolah akan bermuara pada pembentukan karakter peserta didik sehingga mereka mampu berinteraksi secara keseluruhan dalam peran-peran tertentu di tengah masyarakat.¹⁶ Dengan Demikian, sekolah dapat mengambil peran penting dalam menciptakan, menjaga, dan membangun perdamaian dengan cara memberikan materi perdamaian yang diintegrasikan ke

¹⁴ Nugroho Eko Atmanto, "Pendidikan Damai...", hal. 158.

¹⁵ Muhammad Syawal Djamil, "Pendidikan Damai" dalam laman web <https://mediaindonesia.com>, tanggal 25 Maret 2019.

¹⁶ Yan Vita, "Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan", *Dimas*, Vol. 14., No. 1, 2014, hal. 25.

dalam kurikulum. Integrasi kurikulum akan terjadi manakala konsep-konsep dan ketrampilan yang dibutuhkan bagi pemecahan konflik digabungkan secara konstruktif ke dalam bidang studi inti. Guru yang mengintegrasikan pendidikan damai/resolusi konflik ke dalam kurikulum hendaklah menciptakan ruang kelas yang mendukung siswa ke arah resolusi konflik dan berperilaku pro-sosial.¹⁷

Dalam konteks pengintegrasian pendidikan damai ke dalam kurikulum, Wulandari menawarkan 3 (tiga) alternatif pengajaran pendidikan damai di sekolah, yaitu: (1) terfokus untuk mengatasi masalah-masalah yang penting dan berkecenderungan ada di masyarakat; (2) diajarkan tersendiri dalam satu mata pelajaran atau bisa juga diberikan melalui mata pelajaran yang sudah ada; dan (3) diberikan melalui kelompok-kelompok kegiatan ekstrakurikuler.¹⁸ Pendidikan damai dapat diajarkan di sekolah secara khusus melalui pendidikan multikultural (*multiculture education*).¹⁹

¹⁷ Donna K. Crawford & Richard J. Bodine, "Youths, Education, and Dispute Resolution" in Michael L. Moffitt & Robert C. Bordone (Eds.), *The Handbook of Dispute Resolution*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hal. 475.

¹⁸ Taat Wulandari, "Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di sekolah", *Mozaik*, Vol. V., No. 1, Januari 2002, hal. 75-81.

¹⁹ Zainal Abidin, "Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-hari", dalam laman web <https://radarsulteng.id>, tanggal 30 Desember 2019; Imam Machali, "*Peace Education*...hal. 48-49; Yan Vita, "Penanaman Budaya...hal. 25-26.

Bahkan ada pula yang mengusulkan agar ia digabungkan ke dalam kurikulum nasional.²⁰ Apabila pendidikan damai tidak diajarkan secara khusus melalui satu mata pelajaran tersendiri, maka ia dapat saja diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, seperti dalam mata pelajaran pendidikan agama,²¹ sejarah, sastra, geografi, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan.²²

Menuju Budaya Damai

Pendidikan damai memiliki peran penting dalam menciptakan dan menghadirkan budaya damai di tengah masyarakat. Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1998 menyatakan bahwa budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara hidup menolak kekerasan dalam segala bentuk dan mengatasinya melalui dialog dan negosiasi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerja sama, keanekaragaman budaya, pemahaman antar bangsa, etnis,

²⁰ Samsu Rizal Panggabean, "Educating to Handle Conflict and Avoid Violence", dalam Charles A. Coppel (Ed.), *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, (London & New York: Routledge, 2006), hal. 227.

²¹ Eka Hendry AR, "Pengarusutamaan Pendidikan Damai (*Peaceful Education*) Dalam Pendidikan Agama Islam (Solusi Alternatif Upaya Deradikalisasi Pandangan Agama)", *At-Turats*, Vol. 9., No. 1, Juni 2015, hal. 11. Lihat juga, Nugroho Eko Atmanto, "Pendidikan Damai...", hal. 165-166.

²² Taat Wulandari, "Menciptakan...hal. 78.

agama, budaya, dan antar individu.²³ Budaya damai yang dinyatakan dalam Deklarasi PBB tersebut merefleksikan dan menginspirasi 6 (enam) aspek berikut: (1) respek terhadap hidup dan Hak Azasi Manusia; (2) penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi; (3) komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang; (4) menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki; (5) penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi; dan (6) penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu.²⁴

Implementasi budaya damai untuk mereduksi budaya kekerasan sesungguhnya merupakan inti ajaran semua agama. Menurut Hasyim Muzadi, sebagaimana dikutip Askar,

²³ Mahlianurrahman, "Membangun Perdamaian Melalui Literasi Keluarga", dalam laman web <https://www.acehtrend.com>, tanggal 30 September 2019.

²⁴ Zainal Abidin, "Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-hari", dalam laman web <https://radarsulteng.id>, tanggal 30 Desember 2019.

dari perspektif ajaran Islam, budaya damai hendaklah dibangun di atas norma dan prinsip nir-kekerasan (*salam*), keadilan (*adalah*), kebebasan (*hurriyah*), moderatisasi (*tawassut*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), musyawarah (*syura*), dan persamaan (*musawah*).²⁵ Dalam Islam, makna damai mewujudkan ke dalam empat mata rantai yang saling terkoneksi, yaitu: damai dalam hubungan dengan Allah yang terwujud apabila manusia hidup sesuai dengan prinsip penciptaannya yang fitri; damai dengan diri sendiri yang akan muncul manakala manusia terbebas dari perang batin; damai dalam kehidupan bermasyarakat yang akan terealisasi ketika kehidupan manusia bebas dari perang dan diskriminasi serta tegaknya prinsip keadilan; dan damai dengan lingkungan yang akan mengejewantah jika manusia tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam sebagai penggerak pembangunan tetapi juga sebagai sumber daya yang harus dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.²⁶

Untuk menciptakan dan mengembangkan budaya damai, diperlukan para aktor yang bertindak sebagai agen. Terkait

²⁵ Askar, "Mengembangkan Budaya Damai di Sekolah Melalui Manajemen Kelas yang Demokratis Berbasis Nilai-nilai Keislaman", *Jurnal Hunafa*, Vol. 6., No. 2, Agustus 2009, hal. 144.

²⁶ Fauzi Saleh, "Konsep *Sulh* dan Konstruksi Pendidikan Damai di IAIN Ar-Raniry", dalam M. Nasir Budiman (Ed.), *Pergulatan Panjang Budaya Damai dalam Masyarakat Multikultural*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 6.

dengan hal ini, penting dikemukakan di sini pandangan James S. Page, sebagaimana dikutip oleh Abidin dan Ismail, yang menyatakan bahwa melalui pendidikan damai, peserta didik dapat diarahkan menjadi agen-agen perdamaian. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan damai sesungguhnya suatu usaha untuk menumbuhkan prinsip dan komitmen serta membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai, dan sikap yang dapat mewujudkan perdamaian. Pihak yang memegang peran utama dalam menciptakan agen-agen perdamaian tersebut adalah guru, karena mereka merupakan *role model* dan sebagai penyampai materi sekaligus bisa mengevaluasi peserta didik.²⁷ Guru sebagai *role model* dimaknai oleh Azra sebagai pemberi teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi setiap peserta didik.²⁸

Selain melalui lembaga pendidikan formal, pendidikan damai yang menghasilkan budaya damai juga bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan informal. Dalam perspektif Danesh, setiap individu dan masyarakat mempunyai *worldview* masing-masing yang dibentuk melalui keyakinan agama, konsep-konsep filosofis, ideologi politik dan pengalaman hidup, serta karakteristik lingkungan. Kendati

²⁷ Zaenal Abidin dan Muhammad Taufik Ismail, "Pembangunan Pendidikan Perdamaian dari Sekolah: Pendekatan Gerakan Sosial", *Suhuf*, Vol. 31., No. 2, November 2019, hal. 195.

²⁸ Azyumardi Azra, "Pendidikan Karakter: Peran Sekolah dan Keluarga", *Makalah Seminar Nasional*, dalam laman web <https://www.erlangga.co.id/>, tanggal 28 September 2012.

demikian, sarana utama untuk menformasi dan mentransmisi *worldview* pada semua masyarakat adalah pendidikan, baik formal maupun informal.²⁹ Salah satu lingkungan pendidikan informal adalah keluarga. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga anak-anak harus diperkenalkan dengan pendidikan damai sejak dini, karena sebuah keluarga di samping menjadi tempat menyemai pendidikan dan budaya damai, ia juga dapat menjadi sumber kekerasan dan pendidikan kekerasan bagi anggotanya.³⁰

Fakta menunjukkan bahwa orang tua, pendidik, dan anak-anak semakin khawatir dan terpengaruh oleh kekerasan seiring dengan semakin meningkatnya masalah-masalah sosial dan kurangnya saling menghormati antar sesama dan dalam lingkungan sekitar mereka. Fenomena seperti ini akan dapat diatasi dengan menciptakan pendidikan nir-kekerasan dalam keluarga. Pendidikan dimaksud ditandai dengan pemenuhan rasa kasih sayang, pola interaksi orang tua dan anak yang dikembangkan atas dasar komunikasi yang terbuka, dan saling menghargai.³¹ Keluarga hendaklah menjadi *school of love*, sebagaimana disarankan oleh Thomas

²⁹ H. B. Danesh, "Towards...p. 64-65.

³⁰ Sukendar, "Pendidikan Damai (*Peace Education*) bagi Anak-anak Korban Konflik", *Walisongo*, Vol. 19., No. 2, November 2011, hal. 277.

³¹ Aunurrahman, "Perdamaian dan Harmoni dalam Perspektif Pendidikan", *Miqot*, Vol. XXXII, No. 1, Januari-Juni 2008, hal. 126-127

Philips, yaitu tempat belajar dan mengembangkan kasih sayang. Setelah mengutip istilah Philips tersebut, Azyumardi Azra³² menambahkan satu catatan penting: “Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai *school of love* dapat disebut sebagai *madrrasah mawaddah wa rahmah*, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang.”

Kekerasan dan Perdamaian

Kekerasan dan perdamaian merupakan dua terma yang saling kait-mengait. Damai tidak akan terjadi manakala kekerasan masih berlangsung. Demikian pula sebaliknya, kekerasan akan sulit menjelma di tengah masyarakat yang damai, karena damai dapat dianggap sebagai ketiadaan kekerasan. Kawasan yang damai bukanlah kawasan yang bebas dari kekerasan pada titik tertentu, namun tak luput darinya pada titik yang lain. Karena sesungguhnya, masyarakat atau tatanan sosial masyarakat yang damai tidak merujuk kepada satu titik, melainkan ia mewujudkan dalam satu wilayah luas yang tanpa kekerasan.

Menurut Galtung, kekerasan akan hadir manakala seseorang atau sekelompok orang berhasil dipengaruhi oleh pihak lain sehingga fisik dan mental mereka yang sebenarnya (aktual) berada di bawah kondisi yang sepatutnya (potensial). Kata “aktual” dan “potensial” adalah terma kunci untuk

³² Azyumardi Azra, “Pendidikan Karakter: Peran Sekolah dan Keluarga”, *Makalah Seminar Nasional*, dalam laman web <https://www.erlangga.co.id/>, tanggal 28 September 2012.

memahami kekerasan, karena kekerasan merupakan penyebab dari perbedaan antara yang aktual dan yang potensial; antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi (*what could have been and what is*).³³ Kekerasan akan mengakibatkan sesuatu terjadi secara aktual (*what could have been*), namun situasi damai akan mampu mendorong sesuatu terjadi secara potensial/yang seharusnya (*what is*).

Dilihat dari sumbernya, kekerasan itu berasal dari 3 (tiga) sumbu, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Galtung menyebutnya dengan istilah segitiga kekerasan (*The Violence Triangle*). Kekerasan langsung (*direct violence*) terjadi jika ada pengirimnya, atau ada seorang pelaku yang memang bermaksud melakukan kekerasan. Jika tidak demikian, maka sebuah kekerasan yang terjadi dapat disebut *indirect violence*. Ia dapat bersumber dari struktur sosial masyarakat, baik antara individu, antara sekelompok orang dalam satu masyarakat, maupun antar kelompok/masyarakat. Karena itu, kekerasan seperti ini disebut kekerasan struktural (*structural violence*).

Dua bentuk kekerasan struktural lazim muncul dalam aspek politik dan ekonomi berupa represi dan eksploitasi. Uniknya, kedua bentuk kekerasan ini bersemayam dalam pikiran dan jasad seseorang, meskipun orang itu belum tentu bermaksud melakukannya. Adapun kekerasan kultural menggejala

³³ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research", *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, 1969, p. 168.

secara simbolik melalui agama dan ideologi, bahasa dan kesenian, ilmu pengetahuan dan hukum, dan dalam pendidikan dan media. Fungsinya sangat sederhana yaitu sebagai sarana melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.³⁴

Sejak tahun 1980-an, aktivis perdamaian mulai memperkenalkan pengertian perdamaian secara lebih substantif. Cheng dan Kurtz (1989), sebagaimana dikutip Yan Vita, berpendapat bahwa perdamaian tidak dimaknai sekedar ketiadaan perang atau berkurangnya tindak kekerasan, melainkan ia diartikan sebagai pemberantasan setiap bentuk dan aspek ketidakadilan.³⁵ Pandangan senada diutarakan oleh Ursula Franklin dengan menyatakan bahwa perdamaian berarti terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan masyarakat. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang bebas dari ketakutan akan tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal yang layak.³⁶ Karena itu, kajian-kajian mengenai perdamaian dan konflik dalam kancah akademik telah membagi esensi perdamaian ke dalam dua kutub yang berbeda, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif.

³⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: Sage Publications Ltd, 1996), p. 2.

³⁵ Yan Vita, "Penanaman Budaya...hal. 22-23.

³⁶ Imam Machali, "*Peace Education...*hal. 43.

Konsep perdamaian negatif dan positif ini sebenarnya dipopulerkan oleh Johan Galtung, salah seorang pendiri studi perdamaian dan konflik modern. Konsep tersebut diperkenalkannya melalui artikel-artikelnya yang dipublikasikan dalam ragam jurnal dan buku pada tahun 1960-an.³⁷ Perdamaian negatif dicirikan dengan ketiadaan perang, sedangkan perdamaian positif ditandai dengan kehadiran keadilan dan nilai-nilai damai lainnya.³⁸

Manusia memahami perdamaian dalam konsepsi yang berbeda-beda. Ada yang memahami perdamaian sebagai sinonim dari stabilitas atau keseimbangan. Konsep perdamaian ini juga mengacu pada kondisi internal manusia, yaitu ketika orang berdamai dengan dirinya sendiri. Ada juga orang yang mempersepsikan perdamaian sebagai ketiadaan kekerasan kolektif yang terorganisir, yaitu kekerasan yang terjadi antara kelompok-kelompok manusia, baik antar bangsa, antar kelompok etnik, ras, dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Dua model perdamaian seperti itulah yang diistilahkan Galtung dengan perdamaian negatif.

Selain itu, ada lagi konsep perdamaian yang ketiga yang menurut Galtung kurang didefinisikan secara jelas, yaitu

³⁷ Joe Majerus, "Negative, Positive, and Universal Peace", Munich, GRIN Verlag. Available at: <https://www.grin.com/document/432933>.

³⁸ Betty A. Reardon, "Peace education: A Review and Projection", *Peace Education Report No. 17*, (Sweden: Malmö University, 1999), hal. 5-6.

damai sebagai sinonim untuk semua hal yang baik dalam komunitas manusia di dunia, khususnya yang berwujud kerja sama dan integrasi antara kelompok manusia. Galtung memberi penekanan pada hal ini sehingga ia bisa disebut damai, yaitu tidak adanya kekerasan. Perdamaian model ketiga inilah yang dinamakan perdamaian positif.³⁹ Secara lebih sederhana, Galtung menyatakan bahwa perdamaian negatif adalah kondisi yang tiada kekerasan dan perang, sedangkan perdamaian positif ditandai dengan integrasi masyarakat.⁴⁰

Konsep perdamaian negatif dan positif kemudian menjadi rujukan dan bahasan dari para peneliti resolusi konflik dan perdamaian. Salah seorang di antaranya adalah Grewal⁴¹ yang menyajikan konsep perdamaian Galtung menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Perbedaan utama di antara dua ciri perdamaian Galtung yang disarikan Gerwal dapat ditabulasikan sebagai berikut:

³⁹ Johan Galtung, *Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking*, (Oslo: *International Peace Research Institute*, 1967), hal. 12.

⁴⁰ Johan Galtung, "An Editorial", *Journal of Peace Research*, hal. 2. Available at <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002234336400100101>

⁴¹ Baljit Singh Grewal, "Johan Galtung: Positive and Negative Peace", School of Social Science, Auckland University of Technology, 30 August 2003. Available at web https://www.academia.edu/744030/Johan_Galtung_Positive_and_Negative_Peace

Perdamaian Negatif	Perdamaian Positif
Tak ada kekerasan	Integrasi struktural
Pesimistik	Optimistik
Kuratif	Preventif
Perdamaian tidak selalu bermakna damai	Perdamaian bermakna damai

Setelah mengurai secara mendalam konsep kekerasan dan perdamaian, Galtung sebagaimana dikutip Grewar, kemudian menyimpulkan bahwa kekerasan dan perdamaian berkembang biak dengan sendirinya dan perdamaian positif merupakan perlindungan terbaik terhadap kekerasan.

Pendidikan Damai dalam Realita

1. Masa Konflik dan Sebelum Tsunami

Setelah beberapa teori dan konsep tentang pendidikan damai dikemukakan di atas, lantas bagaimana implementasi pendidikan damai di tengah-tengah masyarakat? Di beberapa negara di dunia, program pendidikan damai dan resolusi konflik telah dijalankan oleh Unicef (*United Nations International Children's Emergency Fund*), sebuah organisasi PBB yang bergerak di bidang pemberian bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibu mereka di negara-negara berkembang. Sejak tahun 1948, Unicef telah masuk ke Indonesia dengan program penyediaan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok.

Dalam masa-masa berikutnya hingga sekarang, Unicef di Indonesia telah mengembangkan program kerja yang lebih luas,⁴² termasuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan damai. Dalam menjalankan program pendidikan damai, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, Unicef tidak mengharuskan satu pendekatan tertentu, misalnya harus diintegrasikan ke dalam kurikulum atau di luarnya atau apakah dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Seringkali pula Unicef mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.⁴³

Di Indonesia, masyarakat sipil (*civil society*) terlibat dalam ragam aktivitas yang terkait dengan pendidikan damai dan resolusi konflik. Bahkan, kelompok-kelompok masyarakat, individu-individu, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah bekerja dalam ragam isu lain yang terkait, seperti HAM, hak-hak pekerja, isu-isu agama, lingkungan, dan sebagainya. Non-Governmental Organisations (NGO) internasional telah pula memainkan peran penting dalam membantu *civil society* di Indonesia melalui bantuan teknis dan finansial.⁴⁴

⁴²Berbagai informasi yang terkait dengan Unicef di Indonesia dapat diunduh pada laman web <https://www.unicef.org/indonesia/id>.

⁴³ Susan Fountain, "Peace Education..."hal. 16.

⁴⁴ Samsu Rizal Panggabean, "Educating to Handle..."p. 225

Di Aceh, kampanye dan promosi pendidikan damai dan resolusi konflik dimotori oleh Unicef. Kegiatan ini telah dimulai oleh Unicef ketika Aceh masih berada dalam cengkeraman konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI/Polri sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia. Menurut Liaison Officer (LO) Unicef di Aceh, Umar bin Abdul Aziz, Unicef telah mulai melakukan program pendidikan damai sebelum status darurat militer di Aceh dicabut.⁴⁵ Untuk menjalankan program tersebut, Unicef bekerjasama dengan *Non-Violence International* (NVI), sebuah NGO Internasional yang bekerja di Aceh. Unicef bertindak selaku penyandang dana, sementara NVI sebagai pelaksana program.

Program yang dilaksanakan oleh Unicef bekerjasama dengan NVI dinamakan PPD (Program Pendidikan Damai). Program ini sempat terhenti karena eskalasi konflik Aceh semakin meningkat. Bahkan, Unicef terpaksa menutup kantornya di Aceh. Setelah konflik Aceh mulai sedikit mereda, pada tahun 2001 kantor Unicef kembali dibuka di Aceh dan PPD kembali digulirkan.

PPD dilaksanakan melalui pendekatan integrasi ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum yang disusun itu

⁴⁵ Sejak tahun 1989, Pemerintah RI menetapkan status DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh dengan sandi Operasi Jaring Merah. Status DOM tersebut dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998.

diperuntukkan bagi siswa SLTA dan berhasil diterapkan di beberapa SMA dan MA di Aceh. “Belum ada karya lain untuk program serupa (pendidikan damai, *pen.*) yang diintegrasikan di sekolah yang sebegus PPD”, tegas Umar. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah melatih para guru yang dikemas dalam program TOT (*Training of Trainer*) secara maraton di seluruh Aceh.⁴⁶

Pada September 2002, konsultan evaluasi Unicef, Carolyne Ashton telah menyampaikan sebuah dokumen berisi laporan evaluasi PPD.⁴⁷ Dalam laporan setebal 45 halaman tersebut, Ashton menyatakan bahwa pihak-pihak utama yang terlibat dalam PPD adalah Unicef, NVI, AusAID, dan para pakar pendidikan di Aceh. Tim penyusun PPD diketuai oleh Dr. Asna Husin, seorang perempuan Aceh. Dalam bulan Oktober 2000, Asna Husin dan deputinya, Aziz Muslim, melakukan pendekatan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Indonesia,

⁴⁶ Wawancara dengan Umar bin Abdul Aziz pada tanggal 22 Juni 2020 di Gampong Bineh Blang, Aceh Besar. Kurikulum PPD yang dimaksudkan Umar dapat diunduh pada laman web http://www.creducation.net/resources/Aceh_Peace_Ed_Curriculum_Indonesian.pdf

⁴⁷ Carolyne Ashton, “Evaluation Report Program Pendidikan Damai”, September 2002, p. 4-5. Dapat diunduh pada laman web http://www.unicef.org/evaldatabase/files/IDS_2002_006.pdf

GAM, dan NGO yang bekerja di Aceh untuk mengajukan program ini. Semua pihak menerimanya tanpa resistensi.

PPD dijalankan selama satu tahun dan didanai oleh Unicef Australia (AusAID). Adapun pihak mitra yang terlibat adalah Dinas Pendidikan Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Propinsi Aceh. Pelaksanaan PPD dibagi ke dalam dua fase yang dimulai pada Pebruari 2001. Pada tahap pertama ini, PPD melibatkan 50 orang guru yang berasal dari 25 SMA dan MA dari 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Mereka mendapatkan pelatihan PPD selama dua minggu. Selanjutnya, para guru kembali ke sekolah masing-masing untuk mengajarkan 21 topik/subjek pendidikan damai selama satu semester. Sebanyak 7.716 siswa tercatat telah mengikuti PPD pada semester pertama ini.

Dalam fase kedua, terjadi revisi kurikulum sehingga topik yang diajarkan bertambah menjadi 27 subjek. 146 guru baru direkrut untuk diberi pelatihan pendidikan damai dan kemudian mengimplementasikannya pada 71 SMA dan MA yang lain. Pada akhirnya, selama dua semester itu, PPD telah melatih 196 guru sebagai *trainer*, 20.240 siswa sebagai peserta didik yang berasal dari 96 SMA/MA yang tersebar dalam 11 kabupaten/kota, termasuk wilayah-wilayah yang diterpa konflik paling aktif.

Implementasi PPD berjalan secara lancar tanpa rintangan yang berarti. Semua pihak yang terlibat terutama pihak pemerintah daerah sangat mendukung program ini. Para guru berhasil mengajar pendidikan damai dengan baik dan sesuai dengan kurikulum. Para siswa pun dengan mudah dapat memahami pengajaran dari dewan guru. Mereka juga tidak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa dalam buku teks dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ini tidak berarti bahwa implementasi PPD bebas dari kendala. Ia tetap ada, namun sama sekali tidak bersumber dari pihak guru maupun siswa.

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi adalah kurang tersedia buku teks secara tepat waktu. Akibat yang ditimbulkan dari hal ini bukan hanya menimbulkan kesulitan bagi guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat menempatkan para siswa dalam posisi riskan. Betapa tidak, mereka hidup dan belajar di kawasan yang penuh dengan kekerasan. Jika ada yang menanyakan apa yang mereka pelajari dalam kelas pendidikan damai, tanpa buku teks, tidak ada jawaban nyata yang dapat mereka tunjukkan. Kendala lain yang dihadapi dalam PPD adalah kekurangan instrument evaluasi untuk mengukur hasil yang dicapai siswa dalam jangka pendek. Padahal, ia diperlukan dalam rangka pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Secara umum, PPD dianggap telah berhasil di tingkat SLTA. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, indikator keberhasilan PPD juga bisa diamati dari pencapaian yang diraih para peserta. Menurut Umar bin Abdul Aziz,⁴⁸ efek yang terlihat kasat mata dari PPD adalah gerakan-gerakan menyuarakan perdamaian yang disuarakan oleh para pemuda dan pelajar mulai bermunculan, padahal situasi Aceh saat itu sedang perang. Karena itu, program tersebut direncanakan direplikasi pada jenjang SLTP, dengan sasaran awal Madrasah Tsanawiyah.

Komitmen UNICEF dan NVI, setelah bekerjasama selama beberapa tahun, PPD ini diharapkan dapat ditangani dan didanai oleh Pemerintah Daerah secara reguler, sehingga ia tidak lagi bersifat *driven program*. Pemerintah Daerah mulai tertarik, hanya saja pada masa itu anggaran yang tersedia belum cukup memadai sehingga meminta kepada Unicef untuk terus mendanai program tersebut. Di Unicef sendiri, alokasi dana untuk itu telah habis dan sedang diusahakan dana baru. Walhasil, dana untuk melanjutkan program didapat tetapi dengan jumlah nominal yang lebih kecil, sehingga NVI merasa agak sulit menjalankan program itu dengan skala dan skema seperti yang telah berjalan. Meski demikian, Unicef dan NVI nyaris menemukan “titik temu”

⁴⁸ Wawancara dengan Umar bin Abdul Aziz pada tanggal 22 Juni 2020 di Gampong Bineh Blang, Aceh Besar.

untuk melanjutkan program, tetapi kemudian musibah tsunami menerpa Aceh, sehingga PPD terpaksa dihentikan.

Selain Unicef, beberapa LSM lokal—dalam masa sebelum tsunami—juga menyelenggarakan ragam pelatihan bagi masyarakat dalam kerangka mempromosikan isu-isu perdamaian dan resolusi konflik. Salah satu program yang dijalankan oleh YP-HAM (Yayasan Peduli Hak Azasi Manusia) adalah ToT *communicating for humanity* dengan melibatkan tokoh-tokoh publik/masyarakat yang dapat menyuarakan isu perdamaian kepada masyarakat.

2. Setelah Tsunami

Pasca tsunami melanda Aceh, Unicef tidak melanjutkan lagi PPD, karena lembaga ini lebih banyak mengambil fokus pada aspek rehabilitasi-rekonstruksi. Lantas, bagaimana nasib pendidikan damai di Aceh? Umar menjelaskan:

“Setelah tsunami, ada juga LSM yang memberikan pelatihan dan pendidikan damai dan resolusi konflik, tetapi yang terstruktur seperti PPD tidak ada. Model yang agak mengarah ke situ dilakukan oleh UNDP, karena memang lembaga ini punya unit project tentang perdamaian. Mereka mempromosikan konsep social justice. Mereka bekerja sama dengan MAA (Majelis Adat Aceh, pen.), menyusun modul, tetapi semua itu bersifat ad hoc. Apatah lagi program itu dijalankan pascatsunami, dimana konsentrasi dan fokus berbagai pihak, baik provider maupun beneficiaries lebih berorientasi pada pembangunan fisik (infrastruktur)”.

Pandangan senada dinyatakan oleh Muslahuddin Daud, ⁴⁹seorang aktivis yang terlibat bersama NVI dalam menjalankan PPD di Aceh. Menurutnya, semua program pendidikan damai yang diselenggarakan pasca tsunami di Aceh oleh berbagai pihak atau lembaga bersifat *ad hoc*. Tidak ada satu lembaga yang melaksanakan pendidikan damai secara sistematis dan terstruktur sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Unicef dan NVI. *“Kunci pendidikan damai tercermin pada sikap, apakah pasif, agresif, asertif. Output dari peace education sebenarnya asertif. Tapi menuju seseorang asertif itu butuh proses, butuh pemahaman yang panjang, butuh pembentukan lingkungan dan itu semua tidak bisa dilakukan secara ad hoc.”* kata Muslahuddin. Karena itu, pendidikan damai mestilah ditransformasikan secara reguler dan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Kalaupun tidak demikian, alternatif lain adalah menjadikannya sebagai program ekstra kurikuler yang permanen.

Setelah proses rehabilitasi-rekonstruksi tsunami berakhir di Aceh, Pemerintah Aceh sepatutnya dapat melanjutkan kembali PPD dalam rangka mengisi perdamaian Aceh ke arah positif. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suadi Zainal tidak mengindikasikan hal itu sama sekali. Pendidikan damai belum menjadi program utama bagi Dinas

⁴⁹ Wawancara dengan Muslahuddin Daud pada 12 Juni 2020 di Banda Aceh.

Pendidikan Aceh. Program utamanya adalah implementasi kurikulum nasional dan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa meskipun Perjanjian Damai (MoU Helsinki) telah berjalan satu dekade, namun Pemerintah Aceh belum membuat satu kebijakan pun mengenai mekanisme implementasi pendidikan damai di sekolah.⁵⁰

Temuan Suadi Zainal sebangun dengan pandangan Umar bin Abdul Aziz.⁵¹ Menurutnya, kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam kerangka implementasi pendidikan damai sekarang bukan pada ketiadaan anggaran, tetapi secara umum perhatian untuk peningkatan mutu pendidikan memang masih rendah. Alasannya, kalau dilihat dari skema, PPD itu bukan berorientasi pada pembangunan fisik tetapi pada peningkatan mutu. *“Jangankan PPD, pelajaran wajib saja tidak menjadi perhatian. Jadi ini soal kebijakan. Kurikulum PPD yang dibuat oleh Unicef telah cukup lengkap. Ada buku panduan untuk guru, untuk siswa, dan ada instrumen evaluasinya. Tinggal laksanakan saja”*, pungkas Umar.

Pandangan yang lebih kritis diutarakan oleh Muslahuddin:

⁵⁰ Suadi Zainal, “Post-Conflict Peace Education...”

⁵¹ Wawancara dengan Umar bin Abdul Aziz pada tanggal 22 Juni 2020 di Gampong Bineh Blang, Aceh Besar.

Kita tentukan dulu secara strategi pemerintahan kita, karena apapun ceritanya ada pada policy. Ada ngak policy yang menganggap pendidikan damai itu penting? Betul-tidak perubahan karakter itu harus kita lakukan? Betul-tidak generasi Aceh harus kita siapkan? Itu dulu yang harus dibuat sebagai payungnya. Selama ini kan tidak ada payung. Saya banyak sekali buat modul. Di Thailand saya yang buat sampai delapan modul. Melatih banyak orang, ribuan, tapi itu semua proyek. Yang saya maksud adalah siapa policy maker sekarang yang terkait dengan pendidikan. Hari ini tidak ada sekolah yang mengajarkan pendidikan damai. Mungkin ada diajarkan tapi sifatnya ad hoc, dalam bentuk ekstra kurikuler, peace camp, training camp, dan sebagainya, tapi tidak ada policynya. Apakah orang melihat bahwa pendidikan damai adalah elemen penting untuk merawat perdamaian? Kalau ya, mana policynya? Jadi masalahnya ada di pemerintah. Sekarang dudukannya harus kita buat. Dimana letaknya, apakah di BRA? Terlalu kecil. Makanya, menurut saya, settingan post-konflik di Aceh itu sangat kabur

Apa yang dinyatakan oleh para informan di atas memang sulit terbantahkan. Faktanya, sampai saat ini, tidak ada satupun sekolah di Aceh yang diketahui publik yang mengajarkan materi pendidikan damai kepada para siswa secara terintegrasi dalam kurikulum. Pengecualian harus diberikan kepada Sekolah Sukma Bangsa (SSB) yang berlokasi di tiga kabupaten/kota di Aceh, yaitu Pidie, Bireun,

dan Lhokseumawe.⁵² Menurut Direktur SSB Pidie, Martunis,⁵³ sejak sekolah ini mulai beroperasi pada tahun 2006, pendidikan damai telah langsung diintegrasikan ke dalam kurikulum dan diampu oleh para konselor yang telah dilatih.

Bahkan, SSB memiliki buku panduan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) yang menjadi acuan pendidikan damai di sekolah. Untuk menjalankan program ini, Yayasan Sukma melatih para guru melalui program ToT. Para guru ini dibekali ragam materi pendidikan damai oleh Samsu Rizal Panggabean, pakar pendidikan damai dan resolusi konflik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setiap tahun, SSB menggelar *in host training* yang diikuti oleh para guru dengan tujuan untuk mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kesukmaan, nilai-nilai pendidikan damai, dan sebagainya. Ketika Samsu Rizal meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu, materi pendidikan damai dalam program *in host training* diisi oleh para konselor yang telah dilatih sebelumnya. Konselor ini adalah para guru SSB yang ada di tiga kabupaten di Aceh. Saat ini, SSB memiliki 6 (enam)

⁵² Untuk mengetahui latar belakang pendirian dan aspek-aspek lain tentang Sekolah Sukma Bangsa, dapat dibaca dalam Ahmad Baedowi, "Nilai-nilai Dasar Sukma Bangsa", *Sukma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, Issue 1, Jan-Jun 2017, hal. 1-18.

⁵³ Wawancara dengan Martunis dilakukan via telepon pada tanggal 4 Juli 2020.

konselor yang berarti masing-masing sekolah digawangi oleh 2 (dua) orang konselor.

Dampak dari pendidikan damai dialami dan dirasakan oleh berbagai pihak. Dari pihak guru, akan memiliki perspektif yang lebih komprehensif ketika “melihat” dan berhadapan dengan para siswa. Mereka tidak memberikan label negatif (*stereotype*, pen.) dan tidak menghakimi (*prejudice*, pen.), tetapi memahami adanya perbedaan latar belakang di antara para siswa, baik terkait aspek pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan karakter sehingga guru dapat mengakomodir itu semua dan kemudian mampu memunculkan potensi yang terbaik dari berbagai aspek yang dimiliki oleh para siswa.

Bagi para siswa, dampak dari pengajaran pendidikan damai terefleksi dari perilaku dan sikap mereka dalam berinteraksi, baik dengan sesama siswa maupun dengan para guru. Dalam lingkungan sekolah memang dilembagakan perilaku damai, misalnya dengan menetapkan *no bullying area*. Di SSB *bullying*, baik fisik maupun verbal, dikategorikan pada pelanggaran tinggi. Perubahan sikap dan karakter sangat terlihat kasat mata terutama pada siswa yang menempuh pendidikan tingkat SLTP bukan di SSB. Ketika mereka masuk SMA Sukma Bangsa, mereka merasa sangat nyaman berada di lingkungan sekolah. Padahal, ketika di SLTP mereka terjerat dalam *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai

korban. Di SSB, nilai-nilai pendidikan damai telah diperkenalkan sejak masa orientasi sekolah. Para siswa di sekolah ini juga dipersiapkan menjadi duta-duta damai ketika kembali atau berada di lingkungan masyarakat.

Damai di Kutub Negatif

Pada 15 Agustus 2020, usia perdamaian Aceh tepat 15 tahun. Dalam pandangan aktivis perdamaian dan resolusi konflik, Juanda Djamal,⁵⁴ bila mengacu pada pengalaman negara-negara yang pernah mengalami konflik bersenjata, maka transformasi trauma/stress masyarakat ke arah damai biasanya terjadi dalam rentang waktu 15-20 tahun, dengan catatan harus ada upaya yang lebih sistematis. Lantas, apakah transformasi yang dimaksudkan Juanda telah atau sedang terjadi di Aceh? Bagaimana progresivitas perdamaian Aceh dalam rentang waktu 15 tahun terakhir?

Melihat pada pencapaian damai hari ini, kita masih sebatas mempertahankan keadaan untuk tidak kontak tembak, tetapi substansi perdamaian belum tercapai. Kita masih berada pada tahapan memulihkan luka. Kalau luka ini tidak disembuhkan dalam waktu 10-20 tahun, maka kecenderungannya akan kembali ke konflik. Karena secara psikologis, baik pelaku maupun korban sesungguhnya belum pulih. Hal ini didukung oleh satu riset yang dilakukan oleh

⁵⁴ Wawancara dengan Juanda Djamal pada tanggal 12 Juni 2020 di Banda Aceh.

Harvard University tahun 2006 di 4 (empat) wilayah dengan tingkat eskalasi konflik tinggi: Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan. Riset ini menemukan data bahwa 65% orang yang berusia 19-24 tahun mengalami tingkat stress/trauma. Mereka pernah melihat langsung penyiksaan dan ragam kekerasan lainnya. Karena itu, ragam tekanan dan trauma yang dialami oleh masyarakat yang pernah mengalami konflik haruslah ditransformasikan ke arah kehidupan damai. Kondisi damai yang dimaksudkan bukan sekedar bebas dari suasana perang, tetapi yang lebih penting adalah mentransformasikan perdamaian ini ke dalam bentuk agenda pembangunan, baik bidang ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya.⁵⁵

Oleh karena itu, agar konflik tidak berulang dan arah kehidupan damai dapat diwujudkan, Juanda Djamal berpendapat:

Sejak awal damai, semestinya kita sudah mendidik satu generasi, katakanlah yang berusia 19-24 tahun tadi, untuk menjadi para pembangun masa depan Aceh. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan. Bahkan yang lebih parah lagi, generasi muda sekarang sudah tidak paham tentang konflik Aceh. Kalaupun ada yang paham, maka itu dalam hitungan yang sangat sedikit. Semestinya pada usia SMA, harus ditanamkan pengetahuan seperti

⁵⁵ Wawancara dengan Juanda Djamal pada tanggal 12 Juni 2020 di Banda Aceh.

ini kepada mereka. Generasi muda Aceh wajib tahu tentang konflik di Aceh agar mereka paham bahwa masa lalu Aceh dinamis, ada masa gelap dan ada masa terang. Sehingga mereka memahami dua konsep ini untuk merekonstruksi pemikiran mereka dalam membangun dengan tidak lagi mengulang hal-hal yang buruk tadi, tapi membangun masa depan Aceh yang gemilang.

Dalam pandangan Muslahuddin, jika perdamaian dimaknai sebagai kondisi tidak ada lagi perang, maka dalam 15 tahun usia perdamaian, Aceh telah menggapai hal itu. Indikasinya adalah tidak ada lagi kelompok sempalan, penghadangan, penembakan, penculikan, dan ragam tindakan kekerasan lain yang identik dengan suasana perang. Akan tetapi apabila dilihat dari konteks substansi damai, maka pencapaiannya belum maksimal, dalam arti kata aspek utilisasi atau mengisi perdamaian itu belum dilakukan secara tuntas.

Memang, sampai saat ini belum ada contoh negara di dunia yang berhasil melakukan transformasi konflik menjadi perdamaian yang menyejahterakan dan berkeadilan. Semua negara berkonflik masih belum tuntas melakukan proses transformasi itu. Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi *pilot project* transformasi konflik ke arah suasana damai. Mengapa demikian? Muslahuddin menyatakan:

“Saya sudah mempelajari 27 negara terparah konflik di dunia. Sebenarnya, Aceh paling mudah untuk bertransformasi. Tingkat kesulitan konflik Aceh berada pada level terendah dibandingkan dengan konflik-konflik lain di seluruh dunia. Dibandingkan dengan Thailand saja, jauh lebih sulit Thailand. Di Aceh cuma ada satu GAM. Di Thailand ada PULO (Pattani United Liberation Organisation, ada BRN (Barisan Revolusi Nasional). Pokoknya ada 6 kelompok sempalan. Lalu, tidak jelas pemimpinnya, dengan siapa hendak bernegosiasi, lalu bercampur antara Islam dan Budha. Karena itu, kalau Aceh saja gagal (transformasi konflik, pen.), jangan mimpi ke dunia yang lain.”

Secara teoritis, setiap situasi pasca damai itu harus diikuti oleh dua hal: *pertama*, DDR (*disarmament, demobilization, dan reintegration*); *kedua*, SSR (*sector security reform*). DDR adalah kunci dari arah dan kondisi pemulihan masyarakat pasca kesepakatan damai. Di Aceh, DDR ini masih banyak sekali kelemahan. Dari aspek *disarmament* (pelucutan senjata), misalnya dalam MoU disebutkan ada 840 pucuk senjata, tetapi faktanya ribuan pucuk lain ditemukan, baik itu diserahkan secara sukarela maupun ditemukan dalam operasi-operasi yang tidak formal.

Demikian pula aspek *demobilization* (penarikan pasukan), yang betul-betul diumumkan kepada publik hanya 33 ribu pasukan TNI ditarik ke barak, tapi tidak ada pengumuman resmi dari pihak GAM. Sebenarnya bagaimana proses

demobilisasi mereka? Jumlah demobilisasi pasukan GAM yang dinyatakan dalam MoU hanya 3 (tiga) ribu orang sementara survei yang dilakukan oleh AMM (*Aceh Monitoring Mission*) mencapai 26 ribu. Muara dari semua ini adalah menyulitkan proses reintegrasi seperti yang dialami dalam proses reintegrasi di Aceh.⁵⁶

Merujuk kepada pandangan dari para informan serta fakta nyata di lapangan, memang harus diakui bahwa dalam usia 15 tahun perdamaian Aceh, ia masih berada pada ruang *the absence of war*. Energi potensial perdamaian belum dapat ditransformasikan secara maksimal menjadi energi kinetik untuk membangun masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan. Jika kondisi ini diamati dengan menggunakan perspektif Galtung, maka perdamaian Aceh masih berada pada kutub negatif. Salah satu langkah strategis untuk meninggalkan kutub negatif menuju kutub positif perdamaian adalah dengan mentransmisikan pendidikan damai bagi generasi penerus masa depan Aceh. Untuk itu, Pemerintah Daerah Aceh perlu segera merumuskan kebijakan regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan perangkat pendukung lainnya bagi keberlangsungan dan kelestarian program pendidikan damai ini.

⁵⁶ Wawancara dengan Muslahuddin Daud pada tanggal 12 Juni 2020 di Banda Aceh.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang disajikan dalam tulisan ini, maka ada beberapa simpulan yang dapat dinyatakan. *Pertama*, Upaya implementasi pendidikan damai di Aceh telah dirintis oleh Unicef sejak status darurat militer masih berlaku di Aceh. Seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik, kantor Unicef terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Tahun 2001 Unicef kembali membuka kantor di Aceh dan bersama dengan NVI (*Non-Violence International*) berhasil menjalankan PPD (Program Pendidikan Damai) yang diintegrasikan ke dalam kurikulum SMA. Setelah tsunami melanda Aceh, PPD terhenti total. Program-program pendidikan damai kemudian dilaksanakan oleh NGO atau lembaga lainnya, namun bersifat *ad hoc* dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Dalam masa ini sampai sekarang, hanya Sekolah Sukma Bangsa yang mengajarkan pendidikan damai secara reguler dan diintegrasikan dalam kurikulum.

Kedua, sebagai daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata, Aceh merupakan kawasan potensial dan prioritas dalam program pendidikan damai. Akan tetapi, keberlanjutan program ini mengalami stagnasi sebagai akibat dari tidak adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah terkait dengan kontinuitas, mekanisme pelaksanaan, dan anggaran pendukungnya.

Ketiga, implementasi pendidikan damai telah membawa efek yang positif bagi siswa, guru, dan lingkungan sosial. Sikap positif dimaksud tercermin dari tutur kata, sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam ragam aspek tidak lagi menjadi pemicu bagi pembedaan, tetapi justru dipandang sebagai energi potensial untuk menemukan nilai-nilai positif dan memunculkan potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap orang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Baedowi, "Nilai-nilai Dasar Sukma Bangsa", *Sukma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, Issue 1, Jan-Jun 2017 (pp.1-18).
- Askar, "Mengembangkan Budaya Damai di Sekolah Melalui Manajemen Kelas yang Demokratis Berbasis Nilai-nilai Keislaman", *Jurnal Hunafa*, Vol. 6., No. 2, Agustus 2009, (pp. 139-152).
- Aunurrahman, "Perdamaian dan Harmoni dalam Perspektif Pendidikan", *Miqot*, Vol. XXXII, No. 1, Januari-Juni 2008, (pp. 122-132).
- Bustami Abubakar, "Catatan Editor" dalam Bustami Abubakar (Ed.), *Ulama dan Politik Menyongsong Aceh Baru*, Banda Aceh, LSAMA, 2011.
- Crawford, D. K., and Richard J. Bodine, "Youths, Education, and Dispute Resolution" in Michael L. Moffitt &

- Robert C. Bordone (Eds.), *The Handbook of Dispute Resolution*, San Francisco, Jossey-Bass, 2005.
- Danesh, H. B. "Towards an Integrative Theory of Peace Education", *Journal of Peace Education*, Vol. 3., No. 1, March 2006, (pp. 55-78).
- Eka Hendry AR, "Pengaruhutamaan Pendidikan Damai (*Peaceful Education*) Dalam Pendidikan Agama Islam (Solusi Alternatif Upaya Deradikalisasi Pandangan Agama)", *At-Turats*, Vol. 9., No. 1, Juni 2015 (pp. 3-13).
- Fauzi Saleh, "Konsep Sulh dan Konstruksi Pendidikan Damai di IAIN Ar-Raniry", dalam M. Nasir Budiman (Ed.), *Pergulatan Panjang Budaya Damai dalam Masyarakat Multikultural*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2007.
- Fountain, Susan "Peace Education in UNICEF", *UNICEF Staff Working Papers*, New York, UNICEF, 1999.
- Galtung, J., "Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking", *International Peace Research Institute*, Oslo, 1967.
- Galtung, J., "Violence, Peace, and Peace Research", *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, 1969, (pp. 167-191).
- Galtung, J., *Peace by Peaceful Means*, London, Sage Publications Ltd, 1996.
- Imam Machali, "*Peace Education* dan Deradikalisasi Agama", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II., No. 1, Juni 2013, (pp. 41-64).

- Nazaruddin Sjamsuddin, "Kata Pengantar" dalam A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Nugroho Eko Atmanto, "Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Pasca Konflik", *Jurnal Smart*, Vol. 03, Nomor 02, Desember 2017 (pp. 155-168).
- Reardon, B. A., "Peace education: A Review and Projection", *Peace Education Report No. 17*, Sweden, Malmö University, 1999.
- Samsu Rizal Panggabean, "Educating to Handle Conflict and Avoid Violence", in Charles A. Coppel (Ed.), *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, London & New York: Routledge, 2006.
- Suadi Zainal, "Post-Conflict Peace Education to Build Sustainable Positive Peace in Aceh" in *Proceeding of The 6th AIC Unsyiah*, Banda Aceh, October 4-6, 2016.
- Sukendar, "Pendidikan Damai (*Peace Education*) bagi Anak-anak Korban Konflik", *Walisongo*, Vol. 19., No. 2, November 2011, (pp. 271-286).
- Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Taat Wulandari, "Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di sekolah", *Mozaik*, Vol. V., No. 1, Januari 2002, (pp. 68-83).

Yan Vita, "Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan",
Dimas, Vol. 14., No. 1, 2014, (pp. 17-28).

Zaenal Abidin dan Muhammad Taufik Ismail,
"Pembangunan Pendidikan Perdamaian dari
Sekolah: Pendekatan Gerakan Sosial", *Suhuf*, Vol. 31.,
No. 2, November 2019 (pp. 187-206).

Website

Ashton, C., "Evaluation Report Program Pendidikan Damai",
September 2002, p. 4-5. Dapat diunduh pada laman
web
https://www.unicef.org/evaldatabase/files/IDS_2002_006.pdf

Azyumardi Azra, "Pendidikan Karakter: Peran Sekolah dan
Keluarga", *Makalah Seminar Nasional*, dalam laman
web <https://www.erlangga.co.id/>, tanggal 28
September 2012.

Galtung, J., "An Editorial", *Journal of Peace Research*, p. 2.
Available at
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002234336400100101>.

Grewal, B.S., "Johan Galtung: Positive and Negative Peace",
School of Social Science, Auckland University of
Technology, 30 August 2003. Available at web
https://www.academia.edu/744030/Johan_Galtung_Positive_and_Negative_Peace

Joe Majerus, “Negative, Positive, and Universal Peace”,
Munich, GRIN Verlag. Available at:
<https://www.grin.com/document/432933>.

Mahlianurrahman, “Membangun Perdamaian Melalui
Literasi Keluarga”, dalam laman web
<https://www.acehtrend.com>, tanggal 30 September
2019.

Muhammad Syawal Djamil, “Pendidikan Damai” dalam
laman web <https://mediaindonesia.com>, tanggal 25
Maret 2019.

Zainal Abidin, “Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan
Sehari-hari”, dalam laman web
<https://radarsulteng.id>, tanggal 30 Desember 2019.

<https://www.worldbank.org/in/news/feature/2012/12/26/indonesia-reconstruction-chapter-ends-eight-years-after-the-tsunami>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218164558-20-19156/bencana-tsunami-akhiri-konflik-di-aceh>

<https://www.liputan6.com/global/read/2294284/15-8-2005-ri-dan-gam-berdamai-di-helsinki>

<https://www.unicef.org/indonesia/id>.